

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

(Studi pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh)

Eliana

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan responden yaitu semua pegawai dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Penelitian ini dilakukan pada dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Jumlah sampel dari penelitian ini berjumlah 30 responden, tetapi hanya 25 kuisioner yang layak untuk dilakukan pengolahan data. Hasil penelitian ini menemukan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai determinasi sebesar 25,6% yang menjelaskan bahwa dalam model regresi ini sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dinas pendidikan Aceh sebesar 25,6% dan sisanya sebesar 74,4% dijelaskan oleh variabel lain. hasil pengujian t_{hitung} dapat nilai 2,818 dimana t_{tabel} 2,068, sehingga $t_{hitung} 2,818 > 2,068 t_{tabel}$ dengan kata lain dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan kualitas laporan keuangan, yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen yang ingin meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh

Kata kunci: sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan ekonomi di setiap negara membutuhkan pemerintahan yang baik disebut *good governance*. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Susilawati & Dwi Seftihani (2014).

Laporan Keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang di catat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Begitu juga dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa opini. Dalam hal ini BPK dapat memberikan 4 macam opini yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan menolak memberi opini atau tidak memberi pendapat (*Disclaimer*). Ketika Badan Pemeriksa Keuangan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini berarti Laporan Keuangan yang dilaporkan oleh pihak Daerah sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan Laporan Keuangan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2011 (<http://www.bpk.go.id>) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010 menggambarkan kenaikan dari hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar dengan Pengecualian dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tingkat tanggung jawab dalam pelaporan keuangan pemerintahan daerah. Namun Badan Pemeriksa Keuangan masih banyak menemukan kelemahan berkaitan dengan pengawasan pengendalian dalam pencatatan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah tersebut

Hasil evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian pada umumnya memiliki pengendalian intern telah memadai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini Tidak Wajar dan Tidak Memperoleh Opini memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Masih banyaknya opini Tidak Wajar dan Tidak Memperoleh Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan efektivitas Sistem Pelaporan Informasi pemerintah daerah belum optimal. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan beberapa kasus kelemahan sistem

pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas:

1. Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat
2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan
3. Terlambat menyampaikan laporan
4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai
5. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Landasan Teoritis

Sistem Akuntansi

“Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan” (Mulyadi,2001:3)

Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan daerah (Kabupatn, Kota, atau Provinsi) yang dijadikan informasi berupa pelaporan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak internal dan eksternal pemerintah yang memerlukan.(Alam S. (2004:2).

Karakteristik Akuntansi Pemerintah

Menurut Baldrick dan Boni Siregar (2001:9), terdapat dua jenis batasan hukum dan administrasi yang ditekankan pada proses akuntansi dan pelaporan keuangan organisasi pemerintah, yaitu:

1. Penggunaan Dana

Dana dalam akuntansi pemerintahan bukan merupakan jumlah aktiva yang disisihkan untuk tujuan tertentu, melainkan merupakan suatu kesatuan akuntansi yang memiliki seperangkat akun yang berimbang sendiri untuk mencatat kas dan sumber keuangan lain, bersama-sama dengan utang dan saldo ekuitas, serta perubahan-perubahan yang terjadi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan dan batasan-batasan lain.

2. Peranan Anggaran

Anggaran pada akuntansi pemerintah ditujukan untuk perencanaan dan pengawasan aktivitas yang dilakukan. Satu hal yang membedakan anggaran dalam organisasi pemerintah dengan organisasi komersial adalah terletak pada perencanaannya

Tujuan Akuntansi Pemerintah

Abdul halim (2007:35) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Pertanggungjawaban (*accountability and stewardship*) adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab terhadap operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut tujuan pertanggungjawaban ini mewajibkan setiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.
2. Manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.
3. Pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah

Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Penyajian Laporan Keuangan

Mardiasmo (2004:37) memaparkan bahwa secara garis besar tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan kandungan sistem akuntansi keuangan daerah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai kepada menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah.

Definisi dan Konsep Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007:7) :

“Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2004:35) mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik

Kerangka Pemikiran



Hipotesis Penelitian

Ho: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah

Ha : Penerapan system akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Sugiyono (2004) adalah sebagai berikut: “Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal yang objektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu)”.

Populasi Penelitian

Sugiyono (2004:72) menyatakan bahwa: “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti itu.”

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan atau staff Bagian keuangan yang berjumlah 112 orang yang berada di Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh.

Sampel Penelitian

Definisi sampel menurut Sugiyono (2004:73) adalah: “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.”

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah teknik *non probability sampling*. Teknik sampling nonprobabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar.

Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sampel yang benar-benar dapat mewakili (*representative*) dan dapat menggambarkan populasi sebenarnya. Tidak semua daerah atau kelompok populasi diteliti, cukup dua atau tiga

daerah kelompok yang diambil sampelnya untuk diteliti.

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian explanatory, penelitian explanatory adalah suatu metode penelitian yang bermaksud untuk mendapatkan kejelasan fenomena yang terjadi secara empiris dan berusaha untuk mendapatkan jawaban hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. Menurut Sugiyono (2011:10) bahwa: “Penelitian explanatory adalah suatu metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan kausal antara variabel satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis.”

Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden yang merupakan karyawan atau staaf di bagian akuntansi atau keuangan di Dinas Pendidikan. Kuesioner adalah seperangkat pertanyaan tertulis yang telah disusun sedemikian rupa untuk dijawab oleh responden, biasanya disertai alternatif alternatif jawaban (Sekaran, 2009).

Variabel Independen

Variabel independen ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2007:4). Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendidikan Aceh untuk tahun 2016. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Variabel Dependen

Variabel dependen disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007:4). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah pada Dinas Pendidikan Aceh untuk tahun 2016. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami.

Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara mengolah data yang terkumpul kemudian dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menunjukan masalah yang telah di rumuskan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan dan kevalidan suatu alat ukur atau instrumen penelitian. Validitas menunjukkan seberapa baik suatu instrumen yang dibuat mengukur konsep tertentu yang ingin diukur (Sekaran, 2006). Alat pengukur yang absah akan mempunyai validitas yang tinggi, begitu pula sebaliknya.

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2) \times (n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

r = koefisien korelasi

n = Jumlah responden

Y = Jumlah skor total seluruh item Y

X = Jumlah skor tiap item X

Selanjutnya hitung nilai t_{hitung}

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah responden

setelah nilai t_{hitung} diperoleh selanjutnya membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{table} pada taraf signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$

- Jika $t_{hitung} \geq t_{table}$, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan valid
- Jika $t_{hitung} \leq t_{table}$, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan tidak valid

Hipotesis perbandingan antara t_{hitung} dan t_{table} adalah sebagai berikut:

$H_o: r_{hitung} \geq r_{table}$, maka pertanyaan pada kuesioner dinyatakan valid

$H_a: r_{hitung} \leq r_{table}$, maka pertanyaan pada kuesioner dinyatakan tidak valid

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauhmana suatu pengukuran tanpa bias dan menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas bersgsn item dalam instrument (sekaran, 2006).

$$\text{Alfa } (\alpha) = \frac{k \cdot \bar{r}}{1 + (k - 1) \bar{r}}$$

Keterangan :

k = Jumlah variabel manifes yang membentuk variabel laten

$\bar{r}$ = Rata-rata korelasi antar variabel manifes

Tujuan perhitungan koefisien keandalan adalah untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban responden. Besarnya koefisien ini berkisar dari nol hingga satu. Makin besar nilai koefisien, makin tinggi keandalan alat ukur dan tingkat konsistensi jawaban.

- Jika $r < 0,20$ maka tingkat keandalan sangat lemah atau tingkat keandalan tidak berarti.
- Jika r diantara $0,20 - 0,40$ maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang rendah tetapi pasti.
- Jika r diantara $0,40 - 0,70$ maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang cukup berarti.
- Jika r diantara $0,70 - 0,90$ maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang tinggi.
- Jika $r > 0,90$ maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang sangat tinggi.

Pengujian Hipotesis

Untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas dan variabel tidak bebas dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

$H_o : r_s \leq 0$ menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

$H_o : r_s > 0$ menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap pertanyaan kuisioner dari variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan Kualitas Laporan Keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel Hasil uji Validitas

Variabel	Butir pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	keterangan
System Akuntansi keuangan pemerintah Daerah	PSA1	0,579	0,396	Valid
	PSA2	0,841	0,396	Valid
	PSA3	0,657	0,396	Valid
	PSA4	0,881	0,396	Valid
	PSA5	0,745	0,396	Valid
	PSA6	0,702	0,396	Valid
	PSA7	0,686	0,396	Valid
	PSA8	0,552	0,396	Valid
	PSA9	0,607	0,396	Valid
	PSA10	0,715	0,396	Valid
Kualitas Laporan Keuangan	KLK1	0,444	0,396	Valid
	KLK2	0,572	0,396	Valid
	KLK3	0,610	0,396	Valid
	KLK4	0,554	0,396	Valid
	KLK5	0,429	0,396	Valid
	KLK6	0,570	0,396	Valid
	KLK7	0,469	0,396	Valid
	KLK8	0,585	0,396	Valid
	KLK9	0,570	0,396	Valid

	KLK10	0,450	0,396	Valid
	KLK11	0,420	0,396	Valid

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat dilakukan bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan untuk lebih dari satu variabel.

Tabel uji Reliabilitas

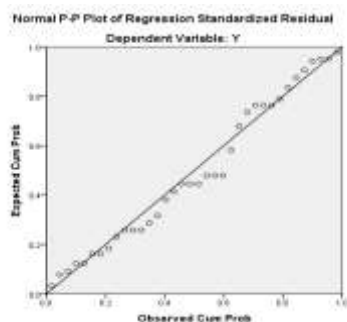
No	Variabel	Jumlah Item	Nilai Alpha	Keterangan
1	Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah	10	0,918	Handal
2	Kualitas Laporan Keuangan	11	0,820	Handal

Analisis Koefisien Korelasi Rank Spearman

			X	Y
Spearman's rho	X	Correlation coefficient	1.000	.442**
		Sig.(2-tailed)	.	.002
		N	45	45
	Y	Correlation coefficient	.442**	1.000
		Sig.(2-tailed)	.002	.
		N	45	45

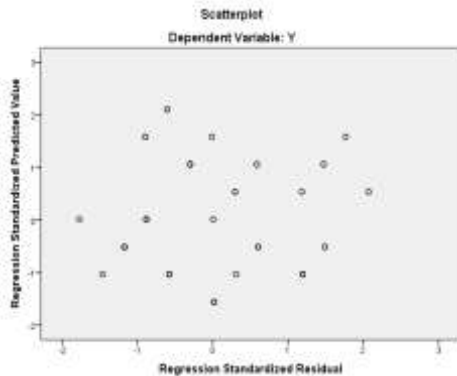
Hasil uji Normalitas

Hasil pengolahan data memperlihatkan *normal probability plot* seperti Gambar 1 sebagai berikut:



Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengolahan data memperlihatkan *heteroskedastisitas* seperti Gambar2 berikut ini:



Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} Kd &= r_s^2 \times 100\% \\ Kd &= 0,506^2 \times 100\% \\ &= 25,6\% \end{aligned}$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa hanya 25,6% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, dengan kata lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 74,4% diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini menggunakan model statistik uji t, untuk mengetahui t_{hitung} dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t = r_s \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_s^2}}$$

$$t = 0,506 \frac{\sqrt{25-2}}{\sqrt{1-0,506^2}}$$

$$t = 2,818 \text{ (} t_{hitung} \text{)}$$

dan untuk pengujian t_{tabel} diperoleh sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 t_{tabel} &= t(\alpha; df) \\
 &= (0,05; 23) \\
 &= 2,068 (t \text{ tabel})
 \end{aligned}$$

Dari hasil pengujian t_{hitung} diatas didapat nilai 2,818 dimana t_{tabel} 2,068, sehingga t_{hitung} $2,818 > 2,068$ t_{tabel} dengan kata lain dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan kualitas laporan keuangan, yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan model statistik uji t, yaitu dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Dapat dilihat pada pengujian hipotesis diatas taraf nyata yang digunakan adalah $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = n-2$. menunjukan nilai t_{hitung} sebesar 2,818, sedangkan untuk nilai t_{tabel} sebesar 2,068. Jika dilihat dari hasil perbandingan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} , maka nilai t_{hitung} sebesar $2,818 >$ nilai t_{tabel} 2,068. Dengan kata lain, apabila nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengandung arti bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independen adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Nilai koefisien korelasi *Rank Spearman* sebesar 0,506, nilai koefisien ini menunjukkan bahwa nilai r_s 0,506 memiliki tingkat hubungan yang sedang dimana hasil berada diantara $0,40 < 0,506 < 0,599$, serta nilai positif menunjukkan peningkatan searah jika X naik maka Y naik atau sebaliknya.

3. Nilai koefisien determinasi sebesar 25,6% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, dengan kata lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 74,4% diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.
4. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t_{hitung} diatas didapat nilai 2,818 dimana t_{tabel} 2,068, sehingga $t_{hitung} 2,818 > 2,068 t_{tabel}$ dengan kata lain dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan kualitas laporan keuangan, yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Saran

1. Manajemen perlu memperhatikan sistem akuntansi keuangan yang digunakan, baik dalam memahami dalam penggunaannya ataupun dalam hal mengetahui pulsa standar akuntansi pemerintahan sehingga dalam mengolah data keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
2. Pentingnya memperhatikan sumber daya manusia, karena SDM yang berkualitas dapat menghasilkan palaporan keuangan yang berkualitas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alam S.2013. Pengaruh Penerapan system Akuntansi Keuangan Pemerintah *Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah*. Penerbit :Erlangga. Jakarta
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia,.2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi.2003..*Akuntansi Manajemen: Konsep, Mamfaat dan rekayasa*. Edisi 3, Cetakan 3. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business.*: Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Salemba Empat. Jakarta
- .Sekaran, Uma. 2007. *Research Methods for Business*. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba.
- Sugiyono.2007. *Statiska Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*: CV. Alfabeta.

<http://www.bpk.go.id> diakses 2017